

LOKASI: Anjongan, Kab. Mempawah

TANGGAL: Rabu, 29 Juli 2026

KATEGORI: Hukum & Daerah

BERITA UTAMA / MEMPAWAH

Konflik Tak Kunjung Usai, Forum Kades Toho dan Pengurus Koperasi Sepakat Usulkan Penghentian Operasional PT PAM

Editor/Jurnalis: Andreas / Redaksi TohoNews | **Waktu Akses:** 11.00 - 13.00 WIB | **Lokasi Rapat:** Sepadan Coffeeshop Anjongan

ANJONGAN (TohoNews) – Forum Kepala Desa Kecamatan Toho bersama pengurus Koperasi Otonom menggelar rapat terbatas (Focus Group Discussion/FGD) guna membahas penanganan konflik berkepanjangan antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Palm Agro Makmur (PT PAM). Rapat yang berlangsung hangat selama dua jam tersebut bertempat di Sepadan Coffeeshop, Anjongan, Rabu (29/7/2026).



FOTO 1: Para Kepala Desa dan Pengurus Koperasi Otonom PT PAM saat melaksanakan diskusi FGD di Sepadan Coffeeshop, Anjongan, membahas resolusi konflik lahan dan bagi hasil kelapa sawit.

Kegiatan rapat mini yang dimulai pukul 11.00 WIB ini diinisiasi langsung oleh Muihuat, Kepala Desa Toho Ilir. Turut hadir dalam pertemuan penting tersebut Edi Takan (Ketua Koperasi Otonom PT PAM sekaligus mantan anggota DPRD Kabupaten Mempawah periode 2014–2019), Samuel Siswoko (Kades Pak Utan), Hendrik (Kades Pentek, Kecamatan Sadaniang), serta Andreas (Kades Benuang yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kades Kecamatan Toho dan Ketua DPC APDESI Kabupaten Mempawah).

Akar Masalah: Janji Bagi Hasil 70%-30% Belum Terealisasi

Dalam pemaparannya, Muihuat — Kades Toho Ilir yang dikenal dengan julukan "Ahok dari Toho" karena gaya bicaranya yang lugas dan tegas mirip mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama — membeberkan secara rinci permasalahan yang dihadapi warganya. Menurutnya, konflik antara masyarakat dan perusahaan PT PAM terkesan dibiarkan tanpa ada solusi konkret. Selain itu, terjadi pula persinggungan lahan dengan PT Antam Tbk serta maraknya aktivitas tambang emas ilegal (PETI).

"Akar permasalahan terletak pada janji komitmen bagi hasil 70%-30% yang hingga hari ini belum terealisasi dengan baik oleh perusahaan. Namun, pihak PT PAM justru cenderung menyalahgunakan masyarakat. Kami mengusulkan agar seluruh operasional PT PAM dihentikan dan lahan dikembalikan penuh kepada masyarakat beserta hak pengelolaannya."

— Muihuat, Kades Toho Ilir

Hal senada disampaikan oleh Hendrik, Kades Pentek. Ia menegaskan bahwa konflik di desanya dipicu oleh ketidaksesuaian bagi hasil dari lahan yang telah diserahkan warga. Akibat kekecewaan tersebut, masyarakat terpaksa memanen sendiri di lahan tersebut.

Hendrik menambahkan bahwa lembaga adat Dayak Kanayatn setempat berencana memasang *Pamabagn* (tempayan adat yang berfungsi sebagai garis polisi adat). Apabila *Pamabagn* telah dipasang, maka secara hukum adat seluruh pihak dilarang keras melakukan aktivitas apa pun di lahan konflik tersebut. Hendrik menyatakan sepakat untuk menarik kembali lahan warga dari pengelolaan PT PAM.



FOTO 2: Suasana keakraban para jajaran Kepala Desa Kecamatan Toho dan Sadaniang bersama pengurus Koperasi Otonom usai merumuskan poin-poin kesepakatan bersama.

Intimidasi Warga & Transparansi Koperasi yang Minim

Samuel Siswoko, Kades Pak Utan, membeberkan bahwa di wilayahnya terjadi pola konflik yang serupa. Warga yang memanen di lahan milik mereka sendiri kerap diintimidasi dan diancam proses hukum sebagai pencuri. Baik lahan luas maupun kecil, hak bagi hasil masyarakat tetap tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Samuel mendukung penuh penarikan lahan, dengan catatan disetujui oleh pengurus Koperasi Otonom.

Menanggapi hal tersebut, Edi Takan selaku Ketua Koperasi Otonom membenarkan bahwa pihak pengurus koperasi pun tidak diberikan kepercayaan dan transparansi penuh oleh manajemen kebun PT PAM.

"Berapa pun hasil panen, harga jual, hingga skema bagi hasil ditangani sepihak oleh manajemen PT PAM. Bahkan pemberdayaan angkutan TBS menggunakan kendaraan milik warga setempat saja tidak diperbolehkan. Jika masyarakat plasma sepakat menarik lahannya, saya siap memfasilitasi pertemuan dan menjembatani diskusi formal."

— Edi Takan, Ketua Koperasi Otonom & Mantan Anggota DPRD Mempawah

Legalitas HGU Dipertanyakan, Sikap Tebang Pilih Ditolak

Sementara itu, Andreas, Kades Benuang sekaligus Ketua Forum Kades Toho dan Ketua DPC APDESI Kabupaten Mempawah, mengibaratkan dilema yang dihadapi para kepala desa seperti "makan buah simalakama". Di satu sisi Kades harus melindungi investasi, namun di sisi lain wajib membela hak warga yang terdzolimi.

Andreas menyoroti legalitas PT PAM yang telah bersosialisasi sejak 2008 dan beroperasi sejak 2010. Sejak menjabat Kades pada 2012, Andreas mengaku telah 3 kali menandatangani berkas pengukuran kadasteral untuk syarat penerbitan Hak Guna Usaha (HGU). Namun hingga saat ini, sertifikat HGU tak kunjung terbit, sehingga secara de jure PT PAM belum sah beroperasi di Kecamatan Toho dan Sadaniang.

Ia juga mengecam perlakuan tebang pilih perusahaan serta pengabaian tenaga kerja lokal. Menurutnya, warga Desa Benuang ditangkap dan dipenjara saat memanen, sementara warga di desa lain dibiarkan. Perusahaan juga semena-mena memecat pekerja lokal dan justru mendatangkan tenaga kerja dari luar pulau, membuat warga setempat hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

Rencana Langkah Strategis Forum Kades

Guna mengakhiri konflik secara permanen, Ketua Forum Kades merumuskan langkah-langkah strategis yang disepakati oleh seluruh peserta rapat:

1. **Konsolidasi Pemilik Lahan:** Masing-masing Kades akan melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama para warga pemilik lahan (terutama pemilik lahan luas) di desa masing-masing.
2. **Finalisasi Kesepakatan:** Menyusun draf kesepakatan bersama terkait usulan pembekuan/penghentian operasional PT PAM di wilayah Kecamatan Toho.
3. **Langkah Koordinasi Lanjutan:** Keempat Kades dan Ketua Koperasi Otonom akan berkoordinasi langsung dengan instansi terkait, termasuk Dinas Perindagkop, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Bupati Mempawah agar operasional PT PAM dapat segera dihentikan secara resmi dan legal.